

## **ANALISA PENGARUH PDRB, KREDIT MODAL KERJA, DAN UMP TERHADAP JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*Unggul Priyadi, Anjar Riyanto*

*Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Alumni Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*

*Email: Priyadi.unggul@yahoo.com, 883130101@uii.ac.id*

### **ABSTRACT**

This research uses secondary data as data sources. This research learns the effect of regional gross domestic product, working capital loans, and province minimum wage towards SMEs developments in Daerah Istimewa Yogyakarta province. Models of analysis that used are analysis tools data panel (pooled data) as data processing tool which data panel is a combination between time series (time-series data) from 2007 – 2011 and cross section (cross-section data) in five regencies in Daerah Istimewa Yogyakarta province. Statistical test uses three models those are common effect, fixed effect, random effect. The result of analysis data shows RGDP and working capital loans significantly take positive effect toward SMEs in Daerah Istimewa Yogyakarta province where RGDP grows higher followed by the economic development so as SMEs grow higher nor working capital loans which released by commercial bank more bigger so as SMEs grow higher. Contrast with province minimum wage which is makes significantly negative effect toward SMEs, which is possibility caused by the bigger province minimum wage becomes constraints toward cost of production but conversely the smaller province minimum wage will push the development of SMEs in Yogyakarta.

Keywords: SMEs, pooled data, fixed effect

### **PENDAHULUAN**

UKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang menjadi pondasi perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994, dinyatakan bahwa UKM merupakan suatu badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani,

peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa). Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan kuantitas tenaga kerja, usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

Pada masa krisis ekonomi tahun 1998 hingga kini UKM berperan sebagai sektor ekonomi yang secara signifikan mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS)

pada tahun 2001, persentase jumlah UKM dibandingkan total perusahaan mencapai 99,9%. Pada tahun yang sama, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh UKM mencapai 99,4% dari total tenaga kerja. Selain itu sektor UKM juga memberi sumbangan besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 59,3%. Data tersebut menunjukkan bahwa UKM memiliki peran sentral bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan output.

Derah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah UKM cukup banyak. Pada tahun 2011 wilayah DIY yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kotamadya, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul

dan Kota Yogyakarta tercatat mempunyai sektor UKM sebanyak 201.975 unit. Salah satu yang menjadi faktor pendukung berkembangnya UKM di DIY yaitu jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu mencapai 3.486.979 jiwa. Selain itu juga ditunjang oleh wilayah DIY yang memiliki 73 wilayah kecamatan serta 438 desa dan kelurahan (Disperindagkop dan UKM Prop. DIY tahun 2011).

Selama kurun waktu 2007 sampai 2011 perkembangan UKM di DIY mengalami peningkatan yang signifikan. Dari kelima kabupaten, jumlah UKM terbanyak ada di wilayah kabupaten Kulon Progo yang mencapai 10.2973 unit pada tahun 2011. Berikut ini rincian perkembangan UKM di DIY:

**Tabel 1: Perkembangan UKM di DIY Dari tahun 2007 – 2011.**

Kab/Kota	Tahun/Unit									
	2007		2008		2009		2010		2011	
	jmlh	%	Jmlh	%	jmlh	%	jmlh	%	jmlh	%
Kota Yogyakarta	9.796	7,14	10.779	70,77	11.997	7,28	16.152	8,86	17.671	8,75
Sleman	12.327	8,99	14.628	96,04	16.763	10,17	20.126	11,04	26.000	12,87
Bantul	11.045	8,05	12.330	80,95	13.518	8,20	14.830	8,14	18.200	9,01
Kulon Progo	82.629	60,25	89.866	58,99	93.628	56,8	97.858	53,7	10.2973	50,98
Gunung Kidul	21.340	15,56	24.716	16,22	28.941	17,56	33.266	18,25	37.131	18,38
DIY	13.7137		152.319		16.4847		18.2232		20.1975	

Sumber : Disperindagkop dan UKM Prop DIY

Jumlah total UKM di DIY dari tahun 2007 sampai 2011 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 10.17%. Berdasarkan tabel 1 dapat ditentukan

pertumbuhan jumlah UKM di berbagai kabupaten di DIY. Ilustrasi pertumbuhan tersebut disajikan pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2 Pertumbuhan Jumlah UKM di DIY**

Kab/Kota	Tahun/Unit			
	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
Kota Yogyakarta	10,03	11,30	34,63	9,40
Sleman	18,67	14,60	20,06	29,19
Bantul	11,63	9,64	9,71	22,72
Kulon Progo	8,76	4,19	4,52	5,23

Gunung Kidul	15,82	17,09	14,94	11,62
DIY	11,07	8,22	10,55	10,83

Sumber: Disperindagkop dan UKM Prop DIY, diolah

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah UKM di DIY mengalami pertumbuhan yang bervariasi. Pada tahun 2008 secara umum jumlah UKM di DIY bertambah, namun pertumbuhannya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007. Sementara itu kabupaten yang pertumbuhannya mengalami peningkatan adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan untuk Kabupaten Sleman, Bantul dan Kulon Progo jumlah UKM mengalami pertumbuhan yang melambat. Meskipun Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah UKM terbanyak namun kabupaten tersebut memiliki pertumbuhan yang paling kecil dibandingkan keempat kabupaten yang lain.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan ataupun pertumbuhan UKM yaitu daya saing yang ditentukan oleh kemampuan SDM untuk memproduksi kualitas barang, harga, disain, dan faktor lingkungan. Dalam hal ini yang menjadi pesaing atau kompetitor UKM di Indonesia adalah maraknya produk-produk luar negeri seperti pakaian jadi baik baru maupun bekas. Produk luar negeri tersebut mendapat respon yang baik dari masyarakat karena kualitas bagus, harga terjangkau dan disain yang disukai masyarakat. Oleh karena itu produk luar negeri bisa menjadi pesaing berat bagi UKM di Indonesia.

Keberadaan UKM agar mampu bersaing dengan produk asing maka kemampuannya harus ditingkatkan. Kualitas produk UKM harus lebih baik atau setidaknya setara dengan kualitas produk asing. Jika hal tersebut bisa tercapai maka barang impor tidak lagi menjadi ancaman bagi UKM. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan pengkajian terkait dengan variabel internal dan eksternal. Variabel internal meliputi:

1. Kemampuan diri untuk memproduksi kualitas barang,

2. Total penjualan

3. Harga,

4. Modal usaha,

5. Desain,

6. Kemampuan bersaing,

7. Kemampuan memilih jenis usaha

Ada pun variabel eksternal meliputi:

1. Kran impor yang harus dibatasi,

2. Harga bahan baku,

3. Ongkos transportasi,

4. Jumlah pembeli,

5. Ongkos produksi, dan

6. Teknologi.

Kedua variabel internal dan eksternal tersebut menjadi faktor yang menentukan keberhasilan UKM dalam bersaing dengan produk asing. Oleh karena itu dalam rangka mencapai pengembangan UKM secara optimal maka perlu dirumuskan beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi UKM selama ini. Dengan demikian pengembangan UKM untuk kedepannya dapat berjalan efektif dan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai.

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah harus terus ditingkatkan, mengingat sektor UKM mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi daerah adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik dengan tingkat pemerataan sebaik mungkin (Prihatmo, 2001). Pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita).

**Tabel 1.1. PDRB Tahun 2007 - 2012 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

No	Kab/Kota	PDRB/Tahun (juta Rp./millions Rp.)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Yogyakarta	4.776.401	5.021.148	5.244.851	5.505.546	5.816.568
2.	Sleman	5.553.580	5.838.246	6.099.557	6.350.336	6.704.100
3.	Bantul	3.448.949	3.618.060	3.779.948	3.967.928	4.176.868
4.	Kulon Progo	1.587.630	1.662.370	1.728.304	1.781.227	1.869.338
5.	Gunung Kidul	2.941.288	3.070.298	3.197.365	3.330.079	3.474.288

Sumber : Badan Pusat Statistik, berbagai edisi.

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa total PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2000 di empat kabupaten dan satu kotamadya di DIY mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Salah satu contoh di kabupaten Bantul tahun 2011 mengalami peningkatan mencapai Rp 4.176.868 (Juta) dibandingkan pada tahun 2008 yang hanya mencapai Rp 3.967.928 (juta).

Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin besar pendapatan masyarakat. Dengan demikian meningkatnya PDRB akan mendukung pertumbuhan UKM di suatu daerah. Sebaliknya jika PDRB semakin

rendah, maka pendapatan masyarakat akan semakin kecil dan hal ini akan menghambat pertumbuhan UKM.

Pertumbuhan produk baik barang maupun jasa menjadi indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya perlindungan usaha berupa ketersediaan lembaga permodalan sangatlah diperlukan. Pembahasan mengenai permodalan dalam rangka pengembangan usaha sudah menjadi masalah klasik. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah terbatasnya lembaga yang memberikan bantuan permodalan. Berikut posisi kredit menurut sektor ekonomi di DIY.

**Tabel 1.2. Posisi Kredit Bank Umum Dalam Rupiah dan ValutaAsing Menurut Sektor Ekonomi Dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007 – 2012.**

No	Kab/Kota	Tahun (juta Rp./millions Rp.)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Yogyakarta	5.510.228	6.362.907	6.806.643	8.348.761	11.123.801
2.	Sleman	1.229.390	1.251.721	1.537.739	1.748.685	2.099.311
3.	Bantul	506.098	602.325	670.762	765.535	924.094
4.	Kulon Progo	345.314	408.283	484.015	568.851	662.588
5.	Gunung Kidul	397.496	512.705	662.679	785.810	938.894

Sumber : Badan Pusat Statistik, berbagai edisi.

Posisi kredit bank umum dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian posisi kredit tersebut belum sepenuhnya menjangkau UKM. Masih banyak Unit Usaha Kecil dan Menengah yang susah mendapatkan akses permodalan. Struktur permodalan yang bersumber dari kredit perbankan, baik berupa kredit modal kerja, maupun kredit investasi, menjadi sangat penting bagi perkembangan suatu usaha. Namun, bila penyaluran kredit perbankan terus menurun, bukan tidak mungkin jika usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat akan terhambat.

Permasalahan yang seringkali menjadi penghambat usaha kecil, koperasi dan sektor informal lainnya dalam memperoleh permodalan adalah sulitnya melaksanakan pengembangan diri. Hal tersebut berdampak sulitnya akses usaha dalam memperoleh bantuan atau kredit dari perbankan. Salah satu alternatif untuk mengurangi atau mempersempit terjadinya kesenjangan sosial dan masalah-masalah tersebut, maka dilakukan pengembangan kemitraan usaha antara pengusaha besar (kuat) dengan pengusaha kecil (lemah).

Pinjaman untuk modal kerja akan memiliki manfaat yang besar bagi UKM dalam mengembangkan usahanya. Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk pembelian barang-barang modal (aktiva tetap produktif) seperti mesin alat produksi, alat bantu produksi, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk UKM. Dengan demikian semakin besar kredit modal kerja yang diberikan, maka kinerja UKM akan semakin tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal itu dikarenakan UKM mampu memperluas pasar, melakukan promosi sehingga penjualan semakin meningkat.

Menjalankan bisnis atau perusahaan baik dalam ukuran kecil, menengah ataupun besar tidak lepas dari peran tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan bagian penting dalam menentukan berjalannya suatu perusahaan, dimana tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Dan untuk memperoleh tenaga kerja, suatu perusahaan harus mengorbankan penambahan pengeluaran yaitu berupa upah sebagai imbalan dasar.

**Tabel 1.3. Upah Minimum Provinsi (UMP) dan KHM/KHL Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2012**

No	Upah Minimum Provinsi				
	2007	2008	2009	2010	2011
1.	500.000/bln	586.000/bln	700.000/bln	745.694/bln	808.000/bln

Sumber: Disnakertrans Propinsi DIY

Salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan biaya tenaga kerja adalah UMP. Semakin besar UMP maka semakin menurun perkembangan UKM di Yogyakarta, dan sebaliknya semakin kecil UMP maka semakin tinggi perkembangan UKM di Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena biaya tenaga kerja dalam Usaha Kecil dan Menengah merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam kelangsungan usaha. Jika biaya tenaga kerja semakin besar, maka harga produk menjadi

semakin tinggi yang mengakibatkan produk tidak dapat bersaing di pasar.

UMP yang besar akan memberikan beban yang tinggi bagi pengelola UKM. UMP di Yogyakarta termasuk dalam kategori yang rendah dibandingkan dengan kota-kota industri seperti Jakarta, Surabaya, atau kota-kota besar lainnya. Kondisi tersebut bisa memberikan keuntungan bagi pengelola UKM di DIY. Semakin rendah UMP yang berarti semakin murah biaya tenaga kerja akan mendorong meningkatnya pertumbuhan UKM

di Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, kredit modal kerja, dan upah minimum propinsi terhadap UKM di DIY.

## LANDASAN TEORI

### Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Perhitungan PDRB didekati dengan tiga cara, yaitu :

- a. Pendekatan Produksi: pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto (NTB) dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya dari masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi.
- b. Pendekatan Pendapatan: Pada pendekatan ini, nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah, gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung neto.
- c. Pendekatan Pengeluaran: Pendekatan ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan di masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan yayasan sosial.

Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin besar pendapatan masyarakat, sehingga akan mendukung tumbuhnya UKM di suatu daerah. Sebaliknya jika PDRB semakin rendah, maka pendapatan masyarakat akan semakin kecil dan hal ini akan menghambat pertumbuhan UKM.

### Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit dalam kehidupan sehari-hari bukan merupakan hal baru bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota besar, tetapi kredit telah populer di masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena manusia adalah *Homo Economic* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Istilah kredit berasal dari Yunani yaitu *credere* berarti kepercayaan bahasa Latin *creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang maupun suatu badan yang memberikan kredit (*kreditium*) percaya bahwa menerima kredit (*debitur*) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan baik itu berupa barang atau jasa (Kohler, 1964:237).

Kredit modal kerja adalah suatu jenis kredit yang diberikan oleh Bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam suatu siklus usaha, hal ini apabila dilihat dari neraca suatu perusahaan berupa uang kas bank ditambah dengan piutang dagang, ditambah persediaan barang jadi, persediaan bahan proses, dan persediaan bahan baku.

Kredit modal kerja juga merupakan fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai sementara kegiatan operasional rutin perusahaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Struktur permodalan yang bersumber dari kredit perbankan, baik berupa kredit modal kerja, maupun kredit investasi, menjadi sangat penting bagi perkembangan UKM. Namun, bila penyaluran kredit perbankan kepada sektor UKM terus menurun, bukan tidak mungkin bila usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Dengan demikian semakin besar kredit modal kerja yang diberikan, maka kinerja UKM akan semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, karena UKM mampu memperluas pasar, melakukan promosi sehingga penjualan semakin meningkat.

### **Upah Minimum Propinsi (UMP)**

Sudah menjadi sifat dasar manusia pada umumnya menjadi lebih baik, lebih maju dari posisi yang di punya saat ini, karena itu mereka menginginkan suatu kemajuan dalam hidupnya (Panggabean, 2002). Dari semua penghargaan yang dapat dan harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, maka faktor kompensasi yang dalam hal ini disebut gaji, upah dan insentif menempati kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu diperlukan sistem pengupahan yang kompetitif.

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Untuk melindungi pekerja/buruh dari kesewenangan pengusaha yang memberikan upah tidak layak serta untuk mendorong peran pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, maka perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan upah minimum.

Tingkatan upah minimum yang ditetapkan juga menjadi penentu bagi keberlangsungan suatu industri baik kecil maupun menengah. Menurut Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan kenaikan UMP ideal bagi industri padat karya sebesar 15%. Dimisalkan, apabila upah minimum provinsi naik berkisar 40% - 60% maka industri ini akan mati karena tidak ada yang mau membayar sejumlah itu. Karena itu pemerintah harus waspada dan memperhitungkan secara benar dalam penentuan UMP.

### **Hubungan Antar Variabel Penelitian**

#### **Hubungan antara PDRB dengan UKM**

Industrialisasi khususnya industri kecil dan menengah atau UKM bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai leading sector. Hal ini berarti dengan

adanya perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya (Arsyad, 2004)

Perkembangan jumlah usaha industri UKM pada dasarnya dapat diukur dengan melihat angka pertumbuhannya. Berdasarkan pengalaman di sebagian besar negara, industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Industrialisasi dapat menghasilkan pendapatan perkapita setiap tahun. Sumbangan kegiatan industri pengolahan (manufacturing) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Arsyad, 2004). Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil pengamatan Arsyad bahwa pada tingkat nasional, terjadi peningkatan sumbangan kegiatan industri terhadap PDB.

#### **Hubungan Antara KMK dengan UKM**

Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pengusaha dalam menjalankan serta meningkatkan usahanya dan pendapatannya. Dengan kepemilikan modal yang terbatas serta kesulitan mendapatkan modal dari luar mengakibatkan sulitnya para pedagang kecil untuk mengembangkan usahanya. Hal ini terutama disebabkan karena kesulitan mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan. Hingga saat ini lembaga keuangan khususnya perbankan yang ada belum mampu menjangkau pengusaha kecil.

Kredit disini diasumsikan sebagai tambahan modal usaha atau untuk investasi. Investasi sendiri dapat diartikan sebagai pengeluaran - pengeluaran yang dilakukan masyarakat terutama pengusaha (RTP) dan bisa juga dilakukan oleh pemerintah (RTN) untuk membeli barang-barang modal ataupun peralatan-peralatan produksi. Tujuannya untuk mengganti atau menambah barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan dan untuk memperbesar jumlah produksi dimasa yang akan datang. Barang

modal adalah barang-barang yang harus melalui proses produksi lebih lanjut untuk menjadi barang jadi atau barang yang siap untuk dikonsumsi. Sedangkan barang konsumsi adalah barang-barang yang siap untuk dikonsumsi.

Setiap perubahan investasi dalam perekonomian masyarakat akan mempengaruhi pendapatan. Sebab secara teoritis setiap penambahan investasi akan menimbulkan kenaikan pendapatan nasional secara berlipat ganda. Peningkatan (I) mendorong kenaikan GNP secara berlipat ganda. Pengeluaran investasi dipandang sebagai pengeluaran yang berdaya tinggi dalam mempengaruhi produk nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika investasi bertambah maka pendapatan juga bertambah. Dengan kata lain jika modal usaha bertambah maka usahanya akan lebih besar dan penghasilan juga akan semakin besar.

Sebaliknya jika investasi berkurang maka pendapatan juga berkurang. Dengan kata lain jika modal usaha sedikit maka pendapatannya juga sedikit (Asfia Murni, 2006:67). Akses kredit bagi pengusaha sektor informal sangat berpengaruh terhadap pendapatan usaha sektor informal. Apabila pengusaha sektor informal mengakses kredit pada lembaga keuangan maka akan meningkatkan usahanya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Meningkatnya produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan akan mempengaruhi tingkat pendapatan.

### **Hubungan Antara Upah Minimum Propinsi dengan UKM**

Upah tenaga kerja, bagi industri usaha merupakan biaya produksi sehingga dengan meningkatnya upah tenaga kerja akan mengurangi keuntungan perusahaan. Pada umumnya, untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan disamping dengan cara meminimalkan biaya juga mengoptimalkan input produksi. Dengan meningkatnya upah berarti meningkatnya biaya produksi dan berpengaruh terhadap permintaan tenaga

kerja (Fitrie Arianti, 2003). FX. Sugiyanto (1991) dalam Fitrie Arianti (2003) juga menyatakan bahwa dalam jangka panjang variabel tingkat upah merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada industri pengolahan. Disamping itu, Entri Sulistari Gundo (1999) juga berpendapat bahwa apabila kenaikan tingkat upah tidak diiringi dengan kebijakan makro yang tepat akan mengurangi kesempatan kerja karena konsekuensi kenaikan upah selalu dikaitkan dengan kenaikan biaya produksi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pengambilan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah UKM, PDRB atas dasar harga konstan 2000, kredit modal kerja menurut sektor ekonomi, dan Upah Minimum Propinsi. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan *Time series* dan *Cross section* dari tahun 2007-2011 dengan obyek penelitian yaitu 4 kabupaten dan 1 kota madya di DIY. Data diperoleh dari Disperindagkop, UKM dan Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta mulai tahun 2007 – 2011.

### **Alat Analisis**

Untuk mengestimasi pengaruh PDRB, kredit modal kerja, dan UMP digunakan alat analisis regresi dengan model data panel (*pooled data*). Ada 3 pendekatan yang digunakan dalam menganalisis panel data yaitu pendekatan *Common effect*, *Fixed effect*, dan *Random effect*. Sebelum model diestimasi dengan model yang tepat, terlebih dahulu dilakukan pemilihan model. Pemilihan model yang digunakan dalam sebuah penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dugaan yang efisien.

Dalam penelitian ini ada dua uji yang dapat digunakan untuk memilih model yang terbaik. Pertama *Chow Test*, uji ini dilakukan untuk memilih yang terbaik antara model



*Common* atau *Fixed Effect*. Kedua Uji Hausman, uji ini dilakukan untuk memilih antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Setelah melakukan estimasi data panel pemilihannya dilakukan dengan melihat probabilitas F statistiknya dengan hipotesis:

1. Uji Chow

H0: memilih menggunakan model estimasi *Common Effect*, jika nilai probabilitas F-statistik tidak signifikan pada 5%.

H1: memilih menggunakan model estimasi *Fixed Effect*, jika nilai probabilitas F-statistik tidak signifikan pada 5%.

2. Uji Hausman

H0: memilih menggunakan model estimasi *Random Effect*, jika nilai probabilitas F-statistik tidak signifikan pada 5%.

H1: memilih menggunakan model estimasi *Fixed Effect*, jika nilai probabilitas F-statistik tidak signifikan pada 5%.

Persamaan model data panel dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ; i = 1, 2, , N \text{ dimana } N \text{ adalah banyaknya data } \textit{cross-section}.$$

Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t ; t = 1, 2, , T \text{ dimana } T \text{ adalah banyaknya data } \textit{time-series}.$$

Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it}$$

$$i = 1, 2, , N ; t = 1, 2, , T$$

dimana :

- N = banyaknya observasi
- T = banyaknya waktu
- N x T = banyaknya data panel

Dari persamaan di atas maka dapat diformulasikan model regresi dalam bentuk *log linier* yaitu sebagai berikut :

$$\text{Log UKM} = \text{Log } \beta_0 + \beta_1 \text{ Log PDRB}_{1it} + \beta_2 \text{ Log KMK}_{2it} + \beta_3 \text{ Log UMP}_{3it} + \text{eit}$$

Keterangan :

Log UKM<sub>it</sub> =Jumlah usaha kecil menengah (UKM) kabupaten i tahun t (unit).

Log β<sub>0</sub> = Konstanta.

β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub> =Koefisien variabel independent.

Log PDRB<sub>1it</sub> =Produk Domestik Regional Bruto kabupaten i tahun t (juta rupiah).

Log KMK<sub>2it</sub> =Kredit modal kerja kabupaten i tahun t (juta rupiah).

Log UMP<sub>3it</sub> =Upah minimum propinsi (UMP) kabupaten i tahun t (rupiah).

## PEMBAHASAN

### Uji spesifikasi pemilihan model

Sebelum mengestimasi apakah variabel yang digunakan berpengaruh terhadap jumlah UKM, maka terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi pemilihan model. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menggunakan *Uji Chow* dengan membandingkan antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai distribusi statistic *Chi Square* sebesar 186.783611 dengan probabilitas 00000 (kurang dari 5%). Dengan demikian secara statistik H0 ditolak dan menerima H1, maka model yang tepat digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*

Langkah selanjutnya adalah membandingkan model *Fixed Effect* dengan *Random Effect* dengan uji *Hausman*. Jika model terjadi perbedaan yang signifikan (sig<0,05) maka model yang tepat adalah *Fixed Effect*. Sebaliknya jika tidak ada perbedaan yang signifikan (sig>0,05) maka model yang tepat adalah *Random*.

Dari hasil pengujian diperoleh nilai distribusi statistic *Chi Square* sebesar 24532991 dengan probabilitas 00000 (kurang

dari 5%) artinya model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan dengan model *Random Effect*.

### Hasil Estimasi

Hasil estimasi dengan menggunakan model *Fixed Effect* diperoleh persamaannya sebagai berikut:

$$Y = -14,619 + 2,95 \text{ LOG(PDRB)} + 0,23 \text{ LOG(KMK)} - 0,2993 \text{ LOG(UMP)}$$

Dari persamaan regresi diketahui bahwa jika tidak ada variabel lain yang mempengaruhi, maka perkembangan UKM konstan turun sebesar 14.19%, dengan diikuti :

1. Setiap kenaikan 1% PDRB, maka jumlah UKM di jogja akan naik sebesar 2.95%
2. Setiap kenaikan 1% kredit modal kerja (KMK), maka jumlah UKM di jogja akan naik sebesar 0.23%
3. Setiap kenaikan 1% upah minimum propinsi (UMP), maka jumlah UKM di jogja akan turun sebesar 0.29993%

### Pembahasan

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect*, diketahui bahwa pada taraf signifikansi lima persen variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap jumlah UKM di DIY. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas (p-value) PDRB adalah 0,0000 yaitu lebih kecil dari 0,05 (5%). PDRB juga memiliki kolerasi yang positif terhadap UKM di Yogyakarta, yang artinya apabila PDRB naik sebesar 1%, maka jumlah UKM di Yogyakarta akan naik sebesar 2.95%. Ini sesuai dengan pendapatan Arsyad (2004) dimana setiap penambahan kegiatan yang ada di industri akan menambah nilai pendapatan perkapita.

Kredit Modal Kerja (KMK) berpengaruh signifikan terhadap jumlah UKM di DIY. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (p-value) KMK sebesar 0.0048, yaitu lebih kecil 0,05. Arah hubungan KMK dengan UKM adalah positif, artinya apabila KMK naik sebesar 1%, maka jumlah UKM di Yogyakarta akan naik sebesar 0.23%. Hal ini sesuai dengan apa yang

diungkapkan oleh Asfia Murni (2006), dimana jika modal usaha bertambah maka usaha industry tersebut juga akan lebih besar dan akan pendapatan juga akan semakin besar. Sebaliknya jika investasi berkurang maka pendapatan juga berkurang. Dengan kata lain jika modal usaha sedikit maka pendapatannya juga sedikit.

Upah Minimum Propinsi (UMP) berpengaruh signifikan terhadap jumlah UKM di DIY karena nilai probabilitas (p-value) lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0.0000. UMP dengan UKM memiliki arah hubungan yang negatif, yang bermakna apabila UMP naik sebesar 1%, maka jumlah UKM di Yogyakarta akan turun sebesar 0.2993%. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh FX. Sugiyanto (1991) dalam Fitri Arianti (2003) dimana ia menyatakan bahwa dalam jangka panjang variabel tingkat upah merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada industri pengolahan. Disamping itu, Entri Sulistari Gundo (1999) juga berpendapat bahwa apabila kenaikan tingkat upah tidak diiringi dengan kebijakan makro yang tepat akan mengurangi kesempatan kerja karena konsekuensi kenaikan upah selalu dikaitkan dengan kenaikan biaya produksi. Bila kesempatan kerja turun maka UKM juga akan mengalami penurunan. Berikut nilai konstanta berdasarkan dummy variabel masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut:

YOGYA--C	-0.913629
SLEMAN--C	-0.817278
BANTUL--C	-0.227662
KPROGO--C	1.645351
GKIDUL--C	0.313218

Berdasarkan hasil dari estimasi model *Fixed Effect*, dipersepsikan jika PDRB, KMK, dan UMP sama dengan nol (tidak mengalami perubahan) maka persentase jumlah rata-rata perkembangan UKM di Yogyakarta pada tahun 2007-2011 sebesar -14,6%. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan masing-masing kabupaten terdapat perbedaan yg signifikan

antar kabupaten, dengan asumsi variabel lain di abaikan.

1. Perkembangan UKM di Kota Yogya bila tidak di pengaruhi variabel lain, turun sebesar 0.9136. Tetapi perkembangan UKM di kota Yogya pada umumnya masih lebih besar 0.9% di banding perkembangan di propinsi DIY secara keseluruhan.
2. Perkembangan UKM di kabupaten Sleman turun sebesar 0.8172. Tetapi perkembangan UKM di kabupaten sleman pada umumnya masih lebih besar 0.8% di banding perkembangan di propinsi DIY secara keseluruhan.
3. Perkembangan UKM di kabupaten Bantul turun sebesar 0.2276. Tetapi perkembangan UKM di kabupaten Bantul pada umumnya masih lebih besar 0.2% di banding perkembangan di propinsi DIY secara keseluruhan.
4. Perkembangan UKM di kabupaten Kulonprogo meningkat sebesar 1.6453. Hal ini berarti perkembangan UKM di kabupaten Kulonprogo pada umumnya masih lebih besar 1.6% di banding perkembangan di propinsi DIY secara keseluruhan.
5. Perkembangan UKM di kabupaten Gunung Kidul meningkat sebesar 0.8172. Hal ini berarti perkembangan UKM di kabupaten Gunung kidul pada umumnya masih lebih besar 0.3% di banding perkembangan di propinsi DIY secara keseluruhan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UKM di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga semakin tinggi PDRB semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta. Dengan demikian perkembangan UKM di Yogyakarta juga akan semakin meningkat.

2. Kredit modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UKM di Yogyakarta. Hal ini berarti semakin besar kredit modal kerja yang dikeluarkan oleh Bank maka perkembangan UKM di Yogyakarta juga akan semakin besar.

3. Upah Minimum Propinsi berpengaruh signifikan negatif terhadap Perkembangan UKM di Yogyakarta. Hal ini diduga jika semakin besar UMP maka akan menjadi kendala besar terhadap biaya produksi. Jika demikian hal tersebut bisa mematikan usaha kecil dan menengah. Sebaliknya semakin kecil UMP maka akan mendorong terjadinya pertumbuhan UKM di Yogyakarta.

### **Saran**

1. Pemerintah Yogyakarta hendaknya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan semua potensi daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sektor industri. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik akan mendorong tumbuhnya UKM. Sehingga pemerataan pendapatan yang terjadi di Yogyakarta akan semakin baik dan tidak hanya didominasi oleh industri besar saja.
2. Dalam pemberian kredit modal kerja bagi UKM diperlukan adanya program kemitraan yang merupakan wadah untuk pengembangan UKM. Tujuannya agar unit program kemitraan sekurang-kurangnya dapat melakukan fungsi pembinaan, evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi, fungsi administrasi dan keuangan.
3. Penetapan UMP hendaknya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Sehingga penetapan UMP tidak hanya menguntungkan tenaga kerja saja tetapi juga menguntungkan pemilik UKM. Dengan kata lain UMP mampu memberikan keuntungan bersama baik pekerja maupun pemilik UKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Laporan Perkembangan UMKM, 2009-2013, Kerjasama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Lestari S, 2007 "Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Maulana I, 2011 "Usaha Kecil Menengah" (On-line) Web <http://ilal125ccblogspotcom> 20 Juni 2013.
- Meydianawati G, 2003 "Analisa Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia" Universitas Udayana, Denpasar.
- Muchlisin, R 2013 "Kajian Pustaka" (On-line) Usaha Mikro Kecil dan Menengah Web <http://www.kajianpustakacom> 19 Juni 2013.
- Parapat G, 2005 "Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi". PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2007 – 2011, Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Yogyakarta Dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Prihatmo W, 2001 "Analisa Potensi Produk Regional Domestik Bruto di Kota Yogyakarta" Sekolah Tinggi Ekonomi, Yogyakarta.
- Posisi Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Sektor Ekonomi, 2007 – 2011, Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Yogyakarta Dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Raselawati Ade, 2011 "Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Ukm di Indonesia", UIN, Jakarta.
- Sadono S, 1998 "Pengantar Teori Makroekonomi", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tejasari Maharani, 2008 "Peranan Sektor Usaha Kecil Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", IPB, Bogor.
- Upah Minimum Propinsi (UMP) dan KHM, 2000 – 2011, Kerjasama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Yogyakarta.
- Wafi A, 2010 "Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, Dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Semarang", UNDIP, Semarang.
- Wiratno B, 2010 "Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah, Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja di Jawa Tengah", UNDIP, Semarang.
- Wulandari E, 2012 "Ruang Emy" (On-line) Definisi Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja Web <http://ruangemyblogspotcom> 19 Juni 2013.